



## KATA PENGANTAR

*Puji dan Syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 dapat terselesaikan pada waktu yang telah ditentukan.*

*Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), dinyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah. Dengan demikian, Penyampaian laporan ini merupakan kewajiban konstitusional sebagaimana telah diatur dalam Pasal 69 ayat 1 dan pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Untuk itu, dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan tersebut, Biro Administrasi Pembangunan sebagai Unit Kerja di bawah naungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat berkewajiban pula menyampaikan LPPD yang merupakan informasi utama untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah.*

*LPPD Biro Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2021 merupakan implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengakumulasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta optimalisasi dalam pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan.*

*Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LPPD ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan baik dalam metode penyajian maupun dalam kelengkapan datanya, oleh karena itu kami membuka diri untuk menerima masukan berupa kritik dan saran atas isi laporan ini demi kesempurnaan dalam penyusunan laporan untuk tahun-tahun berikutnya.*

*Kepada Tim Penyusun yang telah bekerja maksimal menyelesaikan penyusunan LPPD ini, kami atas nama Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT memberikan Rahmat-Nya bagi kita semua, Amiin.*

Pontianak, Januari 2022

Plt. KEPALA BIRO ADMINISTRASI  
PEMBANGUNAN,

**Dra. ANA PAULA MACEDO DE SAUSA MOTA**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19640403 198503 2 015



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar		1
Daftar Isi		2
BAB I	Pendahuluan	3
1.1	Latar Belakang	3
1.1.1	Penjelasan Umum	
1.1.2	Perencanaan Pembangunan Daerah	11
BAB II	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	15
2.1	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	15
2.2	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	15
BAB III	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	25
BAB IV	Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	27
BAB V	Penutup	28



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

#### 1.1.1 Penjelasan Umum

##### a. Gambaran Perangkat Daerah, Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan, Informasi Data Pegawai

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, pada pasal 2 huruf a disebutkan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.

Menindaklanjuti Peraturan Daerah diatas, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Mengacu pada pada pasal 5 angka (1) Peraturan Gubernur tersebut diatas, Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari:

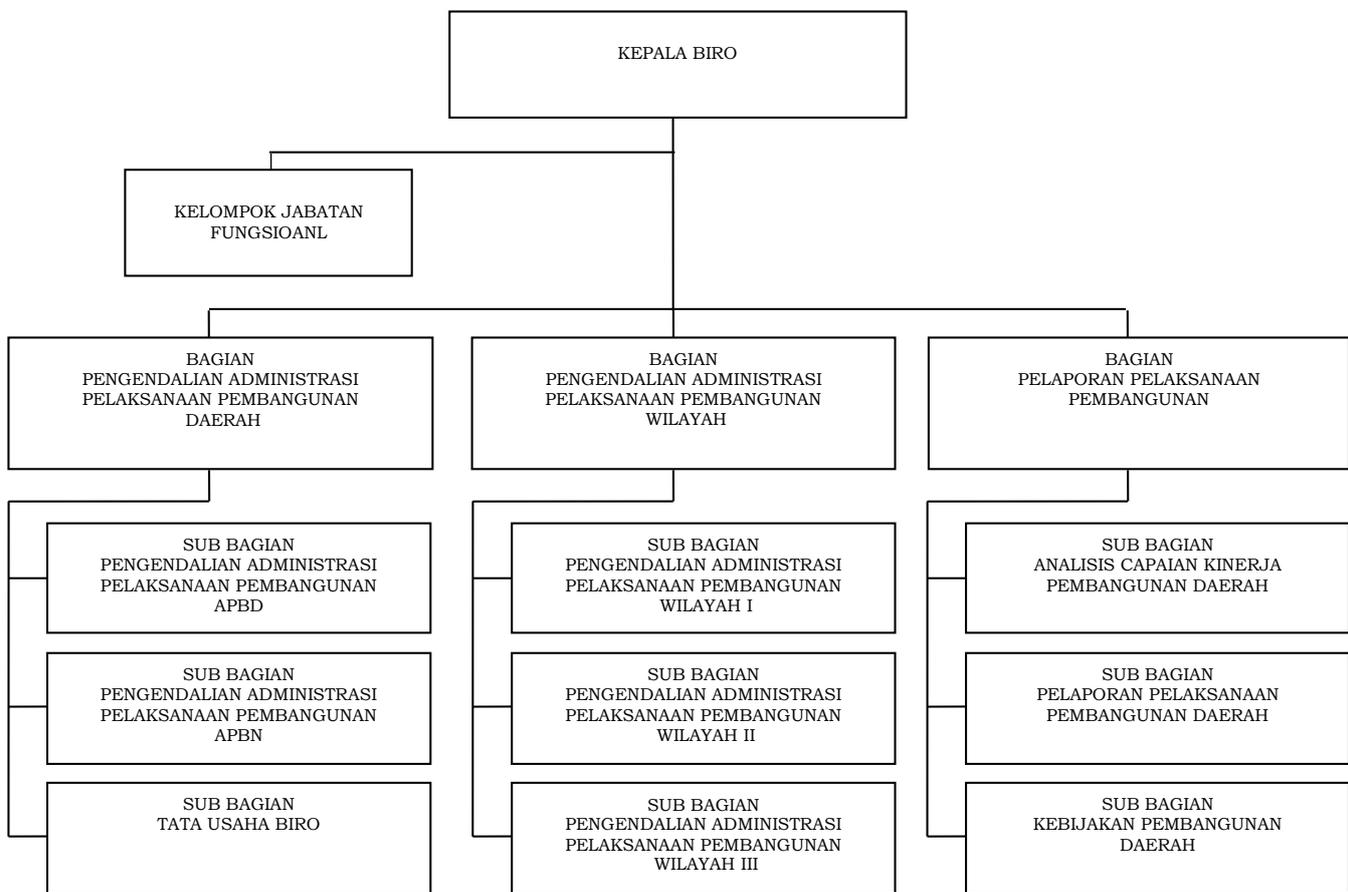
1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengkoordinir :
  - a. Biro Pemerintahan;
  - b. Biro Kesejahteraan Rakyat;
  - c. Biro Hukum.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengkoordinir :
  - a. Biro Perekonomian;
  - b. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
  - c. Biro Administrasi Pembangunan.
4. Asisten Administrasi dan Umum, mengkoordinir :
  - a. Biro Organisasi;
  - b. Biro Umum;
  - c. Biro Administrasi Pimpinan.



Susunan/Struktur Organisasi Biro Adiministrasi Pembangunan yang terdapat dalam lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat., adalah sebagai berikut:

Bagan 1.1

Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan



Pada pasal 174 dijelaskan bahwa Biro Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf c, mempunyai **tugas** merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah pada bidang pengendalian administrasi pembangunan daerah, pengendalian administrasi pembangunan wilayah, serta pelaporan pelaksanaan pembangunan.



Selanjutnya pada pasal 175 dijelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Biro Administrasi Pembangunan mempunyai **fungsi** :

1. Perumusan program kerja pada bidang Administrasi Pembangunan;
2. Perumusan kebijakan pemerintah daerah pada bidang pengendalian administrasi pembangunan daerah, pengendalian administrasi pembangunan wilayah, serta pelaporan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi pada bidang pengendalian administrasi pembangunan daerah, pengendalian administrasi pembangunan wilayah, serta pelaporan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan koordinasi pada bidang pengendalian administrasi pembangunan daerah, pengendalian administrasi pembangunan wilayah, serta pelaporan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pada bidang pengendalian administrasi pembangunan daerah, pengendalian administrasi pembangunan wilayah, serta pelaporan pelaksanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang pengendalian administrasi pembangunan daerah, pengendalian administrasi pembangunan wilayah, serta pelaporan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pelaksanaan tugas lainnya pada bidang administrasi pembangunan yang diserahkan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten Perekonomian dan Pembangunan.



Biro Administrasi Pembangunan merupakan unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan salah satu unit kerja administratif yang bertugas merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan bidang pelaksanaan pembangunan Daerah. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan tidak terpaku pada salah satu ataupun beberapa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib/Pilihan saja, namun sebagai pendukung semua Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan tidak terlepas dari sumber daya aparatur, baik ditingkat struktural maupun fungsional. Berdasarkan data per 31 Desember 2021, Biro Administarsi Pembangunan didukung oleh 42 Pegawai Negeri Sipil. Adapun komposisi Sumber Daya Manusia tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1

Data Pegawai menurut Analisis Beban Kerja (ABK) Biro Administrasi Pembangunan  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021

NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN	STANDAR KEBUTUHAN SDM APARATUR (ABK)	ASN TAHUN 2021
1	2	3
Kepala Biro Administrasi Pembangunan	1	0
A. Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1	1
a. Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1	1
1) Fungsional Tertentu	-	-
2) Fungsional Umum	3	3
b. Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1	1
1) Fungsional Tertentu	-	-
2) Fungsional Umum	3	2
c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro	1	1
1) Fungsional Tertentu	-	-
2) Fungsional Umum	16	8
B. Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	1	1
a. Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I	1	1
1) Fungsional Tertentu	-	-



2) Fungsional Umum	4	4
b. Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II	1	1
1) Fungsional Tertentu	-	-
2) Fungsional Umum	4	2
c. Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III	1	1
1) Fungsional Tertentu	-	-
2) Fungsional Umum	-	3
C. Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1	1
a. Kepala Sub Bagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	1	1
1) Fungsional Tertentu	-	-
2) Fungsional Umum	3	2
b. Kepala Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1	1
1) Fungsional Tertentu	-	-
2) Fungsional Umum	2	3
c. Kepala Sub Bagian Kebijakan Pembangunan Daerah	1	1
1) Fungsional Tertentu	-	-
1) Fungsional Umum	4	3
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>42</b>

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa Biro Administarsi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat kekurangan Sumber Daya Manusia yang seharusnya dibutuhkan 51 (lima puluh satu) orang namun hanya tersedia 42 (empat puluh dua) orang.

#### **b. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Perangkat Daerah**

Tahun 2021 total pagu anggaran Biro Adminitrasi Pembangunan tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 841.244.380,00 dengan realisasi mencapai Rp.839.956.459,00 atau sekitar 99,85%. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja tersebut ada pada halaman selanjutnya.



**Tabel 1.2**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2021 Dalam Mewujudkan Kinerja Organisasi**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN/BELANJA PERUBAHAN 2021		
		PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>171.067.216,00</b>	<b>171.067.216,00</b>	<b>100%</b>
<b>I.1</b>	<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>77.397.985,00</b>	<b>77.397.985,00</b>	<b>100%</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.856.594,00	35.856.594,00	100%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.231.008,00	12.231.008,00	100%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	20.634.264,00	20.634.264,00	100%
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.676.119,00	8.676.119,00	100%
<b>I.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>29.824.418,00</b>	<b>29.824.418,00</b>	<b>100%</b>
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.100.000,00	1.100.000,00	100%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	28.724.418,00	28.724.418,00	100%
<b>I.3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	0,00	0
<b>I.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>29.593.043,00</b>	<b>29.593.043,00</b>	<b>100%</b>
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.140.000,00	10.140.000,00	100%
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.505.000,00	5.505.000,00	100%
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.948.043,00	13.948.043,00	100%
<b>I.5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>16.289.170,00</b>	<b>16.289.170,00</b>	<b>100%</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.289.170,00	16.289.170,00	100%
<b>I.6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>17.962.600,00</b>	<b>17.962.600,00</b>	<b>100%</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.548.100,00	5.548.100,00	100%



2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	12.414.500,00	12.414.500,00	100%
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>	<b>9.345.871,00</b>	<b>9.345.871,00</b>	<b>100%</b>
<b>II.1</b>	<b>Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b>	<b>9.345.871,00</b>	<b>9.345.871,00</b>	<b>100%</b>
1	Penataan Analisis Jabatan	9.345.871,00	9.345.871,00	100%
<b>III</b>	<b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>660.831.293,00</b>	<b>659.543.372,00</b>	<b>99,81%</b>
<b>III.1</b>	<b>Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>346.660.922,00</b>	<b>346.660.922,00</b>	<b>100%</b>
1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	71.782.064,00	71.782.064,00	100%
2	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	62.122.592,00	62.122.592,00	100%
3	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	212.756.266,00	212.756.266,00	100%
<b>III.2</b>	<b>Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>314.170.371,00</b>	<b>312.882.450,00</b>	<b>99,59%</b>
1	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	107.941.931,00	106.654.010,00	98,81%
2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	151.979.784,00	151.979.784,00	100%
3	Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	54.248.656,00	54.248.656,00	100%
	<b>TOTAL</b>	<b>841.244.380,00</b>	<b>839.956.459,00</b>	<b>99,85%</b>

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis, didukung dengan pagu anggaran total sebesar Rp. 841.244.380,00,- melalui 3 (tiga) program dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 839.956.459,00,- atau sekitar 99,85%.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Langsung tersebut tersaji pada tabel 1.3 di bawah ini :



Tabel 1.3  
Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2021

Kode rekening	Instansi/Organisasi	Anggaran Belanja	Realisasi				Total Realisasi Belanja	%
			Realisasi Belanja Tidak Langsung	Jenis Belanja				
				Pemeliharaan	Barang & Jasa	Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	841.244.380,00	0	17.864.100,00	822.092.359,00	-	839.956.459,00	99,8

Tabel 1.3  
Anggaran dan Realisasi Belanja Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Kode rekening	Uraian Program/Kegiatan	Anggaran Belanja (DPPA)	Realisasi				Total Realisasi Belanja	%
			Realisasi Belanja Tidak Langsung	Jenis Belanja				
				Pemeliharaan	Barang & Jasa	Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<b>171.067.216,00</b>	0	17.864.100,00	153.203.116,00	0	171.067.216,00	100
2.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	<b>9.345.871,00</b>	0	0	9.345.871,00	0	9.345.871,00	100
3.	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	<b>660.831.293,00</b>	0	0	659.543.372,00	0	659.543.372,00	99,8



## 1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

### a. Permasalahan Strategis Perangkat Daerah

Hasil pelaksanaan program/kegiatan strategis tentunya terdapat beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi. Berikut disampaikan beberapa **hambatan/permasalahan** yang dihadapi, yaitu :

1. Urusan Ketatausahaan.
  - a. Kurangnya sumber daya aparatur dilihat dari kuantitas dan kompetensi, sementara beban kerja yang cukup banyak sehingga pelaksanaan beberapa kegiatan kurang optimal.
  - b. Kebijakan sentralisasi beberapa urusan yang ada pada Sekretariat Daerah seperti pengadaan dan pemeliharaan barang inventaris serta pengembangan sumber daya aparatur mengakibatkan sulitnya upaya untuk melakukan peningkatan sarana dan prasarana maupun sumber daya aparatur.
2. Urusan Pengendalian Administrasi Pembangunan
  - a. OPD Provinsi Kalimantan Barat maupun Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat sering terlambat menyampaikan laporan keuangan dan fisik sehingga evaluasi secara berkala (triwulan) tidak optimal karena data kurang lengkap.
  - b. Masih ada tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok fungsi pengendalian administrasi pembangunan pada beberapa OPD pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
  - c. Belum terintegrasinya aplikasi perencanaan, pengawasan, proses pengadaan barang/jasa serta pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Dari hambatan / permasalahan yang dihadapi, upaya **pemecahan/ solusi** guna mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran diatas adalah sebagai berikut.



1. Urusan Ketatausahaan.
  - a. Menyusun analisis jabatan guna menghitung kebutuhan optimal sumber daya aparatur guna menunjang tugas, fungsi dan tatakerja sebagai bahan pertimbangan permohonan tambahan sumber daya aparatur kepada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan/Barat.
  - b. Mengusulkan kepada pimpinan agar biro biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat melaksanakan urusan tertentu seperti peningkatan kualitas sumber daya aparatur khusus untuk lingkungan sendiri.
2. Urusan Pengendalian Administrasi Pembangunan
  - a. Mengingat kembali secara berkala melalui surat pimpinan kepada OPD dan Kabupaten/Kota agar dapat menyampaikan laporan/data secara berkala dan tepat waktu.
  - b. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan setiap awal tahun anggaran dan membuka contact person yang dapat dihubungi kapan saja agar pejabat/staf yang menangani pelaporan dapat berkonsultasi dan berkoordinasi.
  - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke tiap-tiap Kabupaten/Kota untuk melihat dan memberi masukan terhadap pelaksanaan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan.
  - d. Membangun kerja sama dengan Kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat dalam rangka sinergi data realisasi fisik / keuangan pembangunan yang bersumber dari APBN.
  - e. Penyusun Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang pembagian tugas Perangkat Daerah dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah yang bersumber dari APBD.
  - f. Melaksanakan rapat koordinasi dengan OPD terkait dalam rangka pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah.



**b. Program Perangkat Daerah Berdasarkan RPJMD**

Adapun Program Strategis Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021 adalah Program Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah ;
  - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
  - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
  - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
- 2) Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah ;
  - Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
  - Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
  - Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah

**c. Kegiatan Perangkat Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan**

Kegiatan Rutin yang ada pada Biro Administrasi Pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan tahunan yaitu :

- 1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
  - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD



**4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

**6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

**7. Fasilitas Kelembagaan dan Analisa Jabatan**

- Penataan Analisis Jabatan



## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

#### 2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan digambarkan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Kunci (IKK) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1**

#### IKK Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			= NIHIL =		

#### 2.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Biro Administrasi Pembangunan telah menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada tahun berjalan melalui Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023.

Sasaran strategis Biro Administrasi Pembangunan telah tertuang dalam program strategis dimana pada Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang terbagi dalam 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Biro Administrasi Pembangunan pada tahun anggaran 2021 melaksanakan tugas, fungsi dan tata kerja melalui 1 (satu) program strategis dengan 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan serta ditunjang oleh 2 (dua) program rutin/penunjang dengan 7 (tujuh) kegiatan didalamnya. Melalui program dan



kegiatan tersebut, total pagu secara keseluruhan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) 2021 berjumlah Rp. 841.244.380,00.

Pelaksanaan evaluasi kinerja tahun 2021 dilakukan terhadap capaian kinerja organisasi dengan menganalisis pelaksanaan kegiatan-kegiatan strategis dalam rangka mencapai sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian kinerja organisasi dapat dilihat dari analisa pada tiap-tiap sasaran strategis. Adapun Biro Administrasi Pembangunan memiliki 1 (satu) sasaran strategis yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

**1. Sasaran Strategis**, Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan.

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 untuk Sasaran Strategis Pertama.**

Analisa dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi kinerja tahun 2021 serta dijelaskan pula penggunaan sumber daya dan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Untuk sasaran strategis tersebut, didukung oleh 1 (satu) program dengan capaian rincian indikator kinerja antara lain :

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Strategis Pertama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Indeks kualitas pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat	Baik	Baik Sekali (Bobot 96,18)	100%



Penjelasan :

Dari tabel diatas perhitungan Indeks kualitas pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat merupakan hasil perhitungan Indikator Program. Hasil persentase tersebut kemudian dihitung berdasarkan formulasi yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu untuk menemukan Indeks kualitas pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan jumlah dari Persentase Perangkat Daerah dalam ketepatan sasaran pelaksanaan pembangunan daerah (Bobot 30%) ditambah Persentase Kab/Kota dalam ketepatan sasaran pelaksanaan pembangunan wilayah (Bobot 30%) ditambah Persentase Perangkat Daerah dalam tingkat kepatuhan pada system pelaporan pelaksanaan pembangunan (Bobot 40%) dengan Kriteria untuk menentukan capaiannya adalah jika hasil kualitas Pengendalian Adm. Pembangunan bernilai 0-20 (Buruk); 21-40 (Kurang Baik); 41-60 (Cukup Baik); 61-80 (Baik); dan 81-100 (Baik Sekali).

Dari realisasi yang dicapai tahun 2021 adalah :

- a. Persentase Perangkat Daerah dalam ketepatan sasaran pelaksanaan pembangunan daerah sebesar 91,18%
- b. Persentase Kab/Kota dalam ketepatan sasaran pelaksanaan pembangunan wilayah sebesar 97,43%
- c. Persentase Perangkat Daerah dalam tingkat kepatuhan pada system pelaporan pelaksanaan pembangunan sebesar 99,00%.

Setelah dikali bobot yang ditetapkan maka didapat hasil Kualitas Pengendalian Adm. Pembangunan sebesar **96,18**, sesuai nilai maka dikategorikan dengan "Baik Sekali".

### **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Berdasarkan data di atas, capaian indikator kinerja utama sudah cukup baik dengan persentase mencapai 100%, hal tersebut juga dipengaruhi dengan penggunaan sumber daya seperti yang dapat ditampilkan pada tabel berikut.



Tabel 3.2

## Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Pertama

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan ( 2 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan )	660.831.293	659.543.372		100,00	0,19

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99,81% dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,19%

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut juga tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian masing-masing sasaran strategis. Sasaran tersebut dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan ditunjang oleh 1 (satu) Program dengan 2 (dua) Kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan dengan dengan capaian kinerja kegiatan rata-rata 100%. Kegiatan-kegiatan dalam hal pengendalian administrasi pembangunan ini sebagian besar dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengendalian administrasi tiap-tiap PD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kab/Kota se-Kalimantan Barat.

**b. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya untuk Sasaran Strategis.**

Biro Administrasi Pembangunan tahun 2021 telah melakukan penyesuaian Indikator Kinerja Utama yang berbeda dari periode sebelumnya namun masih dalam kontes yang sama, untuk itu indikator yang digunakan adalah indikator yang telah disesuaikan.



Adapun perbandingan kinerja berdasarkan capaian IKU beberapa tahun terakhir yang disajikan pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2019		%	2020		%	2021		%
			Targ et	Realis asi		Targ et	Realis asi		Targ et	Realis asi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Baik	Baik Sekali	100%	Baik	Baik (Nilai : 76,23)	100%	Baik	Baik Sekali (Nilai : 96,18)	100%

**c. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja sampai tahun 2021 dengan target RENSTRA untuk Sasaran Strategis Pertama.**

Analisa dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan akhir tahun 2021 dengan target yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Indikator yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis Pertama Biro Administrasi Pembangunan, dan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3  
Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN UTAMA	REALISASI				TARGET 2023
			2020	2021	2022	2023	
1	2	3		4	5		6
1	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Indeks kualitas pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat (IKU RENSTRA 2019-2023)	100%	100%	-	-	100%



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada tahun sebelumnya juga mencapai target 100% sesuai dengan pembobotan yang telah dilakukan dalam pengukuran kinerja.

**d. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan untuk Sasaran Strategis Pertama.**

Dalam rangka mewujudkan pengendalian administrasi pembangunan yang efisien dan efektif, Biro Administrasi Pembangunan melalui tugas fungsi dan tata kerjanya mengkoordinir seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (PD) di Provinsi Kalimantan Barat serta memfasilitasi Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dalam hal pengendalian administrasi pembangunan baik untuk pelaksanaan maupun pelaporan. Dari hasil pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan selama tahun 2021, seluruh PD melaporkan pelaksanaan pembangunan baik realisasi keuangan dan fisik dapat tepat waktu dengan fasilitasi yang ditunjang dengan teknologi informasi.

Dari hasil pelaksanaan program/kegiatan di atas, tentunya terdapat beberapa **hambatan/permasalahan** yang dihadapi. Berikut disampaikan beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi, yaitu :

- 1) Bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
  - a. Adanya refocusing anggaran APBD dan APBN sebanyak 2 kali sehingga menimbulkan perubahan internal di Dinas/Biro/UPT (proses SPJ, Jadwal Ulang Kegiatan, Revisi Kontrak, Revisi DPA, DII), sehingga berdampak pada keterlambatan OPD dalam penyampaian laporan dan tidak optimalnya penyerapan anggaran sesuai rencana per triwulan.
  - b. Adanya penghapusan dan peleburan OPD (Dinas, UPT) sehingga terjadi perpindahan anggaran dan berakibat realisasi terhenti dan menunggu perubahan/penyesuaian anggaran baru, sehingga berdampak pada keterlambatan OPD dalam penyampaian laporan, tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan yang berdampak pada penyerapan anggaran yang tidak sesuai rencana per triwulan.



- c. Adanya pandemi covid-19 dan refocusing anggaran sehingga pelaksanaan rakor evaluasi penyerapan anggaran tidak dilaksanakan, hal ini berdampak pada kurang maksimal informasi perubahan dan solusi dalam mendorong penyerapan anggaran keuangan dan fisik OPD tersebut.
  - d. Dukungan sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga berdampak pada kurang optimalnya kelancaran hasil kerja.
  - e. Dukungan SDM yang tidak memadai untuk menunjang program dan kegiatan sehingga berdampak pada kurang optimalnya pencapaian kinerja.
- 2) Bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
- a. Adanya Pemotongan Dana DAK karena adanya pemangkasan Covid-19 sehingga sangat berpengaruh terhadap capaian kerja;
  - b. Pada Dana Tugas Pembantuan biasanya Dana tersebut di keluarkan pada pertengahan tahun;
  - c. Untuk Dana DAK Fisik dan non fisik adanya perubahan Nomenklatur dan Perubahan Nomor rekening karena ada pergeseran Anggaran;
  - d. Juknis yang sering terlambat dan selalu berubah sehingga harus merevisi kembali kegiatan yang telah direncanakan termasuk adanya Refocusing Anggaran;
  - e. Adanya perubahan aturan pengadaan Barang dan Jasa dari peraturan LKPP No 9 tahun 2018 menjadi peraturan lembaga LKPP No 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa, Pemerintah melalui penyedia, dan saat ini sedang menunggu revisi dan inspektorat terhadap Daftar Kontrak kegiatan ke Aplikasi OMSPAM;
  - f. Kegiatan sudah mulai berjalan namun tetap mengikuti peraturan Social distancing terkait pandemi Covid-19 hal ini juga menyebabkan kegiatan tidak bisa terlaksana secara maksimal dan untuk proses pencairan yang sudah dilaksanakan Proses penginfutan LS-DAK pada Aplikasi Simakda ( On Proses );



- g. Masih banyak yang terlambat melakukan lelang /Tender Untuk beberapa Kegiatan sampai dengan Triwulan ke III sehingga waktu masa pelaksanaan menjadi terlambat dan perlu revisi anggaran melalui Anggaran tambahan /perubahan;
  - h. Untuk Pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa lainnya masih belum optimal terlaksana karena prioritas utama pengadaan hanya untuk disektor Kesehatan guna menunjang pencegahan dan Penanggulangan dampak Covid-19;
  - i. Untuk Pelatihan dan Bimbingan teknis belum dapat dilaksanakan secara tatap muka sehingga pelaksanaanya belum semuanya optimal di sebabkan terbatasnya waktu pembelajaran hanya melalui meeting zoom pada semua instansi;
  - j. Masih terdapat pelaksanaan pekerjaan pengadaan tidak tepat waktu tidak sesuai dengan masa/waktu Kontrak yang telah di tentukan sehingga pelaksanaan Administrasi pembangunan mengalami hambatan baik dalam penggunaan Anggaran DAK Fisik dan Non Fisik;
  - k. Masih terdapat unit kerja Penerima Dana Alokasi APBN Dana DAK dan Tugas Pembantuan ) yang belum Menyampaikan laporan secara tepat waktu. sehingga harus dilakukan Jemput Bola;
  - l. Terbatasnya SDM yang menangani tugas monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat;
  - m. Belum optimalnya koordinasi antara unit kerja terkait dalam pemanfaatan dana APBN yang ada untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah, baik sebagai unit kerja pengelola dana APBN maupun unit kerja terkait yang menangani administrasi pelaporan dan pengendalian pembangunan;
- 3) Bidang Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
- a. Terkait beberapa kasus permasalahan dan kendala dilapangan dalam pelaksanaan TEPPRA (Tim Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran) di Provinsi Kalimantan Barat yaitu terdapat beberapa OPD



yang memiliki Akun Double, sehingga menyulitkan Pejabat penghubung untuk memonitoring laporan realisasi OPD pada SISMONTEPRA, ada beberapa OPD dimana penginputan Struktur Anggaran jumlah total pagu berbeda dengan yang ada di DPA, Target pada Aplikasi SISMONTEPRA beberapa OPD lebih dari Pagu setelah refocusing, beberapa OPD belum melakukan penginputan pada Paket Pengadaan Barang Jasa, hal ini disebabkan oleh OPD belum mengupdate, belum merencanakan paket strategisnya, bahkan ada beberapa OPD yang operator SISMON-TEPRA masih baru sehingga perlu adanya pelatihan dan bimbingan.

- b. Biro Administrasi Pembangunan melalui bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah telah melakukan Monitoring proyek-proyek Strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Strategis (AMEPS) namun terkait pengisian aplikasi sering terhambat.
- c. Sehubungan dengan adanya perubahan nomenkelatur yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Biro Administrasi Pembangunan menjadi Unit Organisasi yang berdiri sendiri dengan struktur dan perangkat kerja yang baru. Perubahan ini tidak serta merta diikuti dengan pemenuhan sarana dan prasarana kerja pendukung tugas dan fungsi. Oleh sebab itu, sarana dan prasarana yang kurang memadai hingga saat ini sangat menghambat pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana kerja.
- e. Selain hal tersebut diatas, kondisi kerja saat pandemi COVID-19 ini juga berpengaruh terhadap serapan anggaran. Refocusing anggaran yang terjadi beberapa kali juga tidak lepas penyebab kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi.



Dari hambatan/permasalahan yang dihadapi, upaya **pemecahan/solusi** guna mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran diatas adalah sebagai berikut.

- 1) Bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
  - a. Jemput bola kepada OPD melalui (medsos, kunjungan langsung ke OPD) untuk mendapatkan data/laporan APBD, APBN.
  - b. Mengingatkan kembali agar dapat menyampaikan laporan tepat waktu.
  - c. Menyarankan kepada OPD, agar sesering mungkin koordinasi kepada lembaga terkait/lembaga pembinaan sehubungan permasalahan pelaksanaan program/kegiatan, agar dapat terlaksana sesuai rencana
  - d. Pelaksanaan kegiatan bidang berdasarkan anggaran yang tersedia setelah refocusing.
  - e. Melakukan Evaluasi dan Monev melalui medsos.
  - f. Mengajukan perubahan sarana dan prasarana ke Biro Umum.
  - g. Mengajukan penambahan staf berdasarkan hasil Anjab.
  
- 2) Bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
  - a. Melaksanakan Pemantauan rutin terhadap perkembangan kegiatan Administrasi Pembangunan Wilayah di Kabupaten/Kota dengan cara melakukan upaya melalui :
    - Permintaan laporan secara Triwulan, Semesteran dan Tahunan;
    - Rapat Teknis internal secara Rutin setiap Triwulan;
    - Pemanfaatan Aplikasi e-monev dan sidak-kalbar;
    - Melakukan meeting zoom untuk koordinasi;
    - Melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi;
    - Menindak lanjuti Surat Edaran dari Gubernur dan Setda Provinsi Klimantan Kalbar Hal Pelaksanaan evaluasi dan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah.



- b. Menyebarluaskan Informasi baru dan penting (Update) berkenaan dengan penyelenggaraan Pembangunan melalui Surat edaran kepada seluruh unit kerja.
  - c. Mengingatkan unit kerja terkait untuk memacu Perkembangan pembangunan sesuai target yang telah ditetapkan dan batas waktu yang tersedia.
  - d. Melaksanakan konsultasi ke Pemerintah Pusat untuk memperoleh informasi yang valid terhadap kebijakan/sinkronisasi permasalahan yang belum dapat diselesaikan dalam mengambil keputusan pelaksanaan pengendalian dibidang pembangunan.
- 3) Bidang Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
- a. Melakukan koordinasi terkaait Aplikasi yang digunakan dalam pelaporan pelaksanaan pembangunan yang ada pada Biro Administrasi Pembangunan agar dapat dilaksanakan dengan optimal.
  - b. Melakukan pembinaan terhadap tenaga administrasi yang bertugas dalam hal pelaporan pelaksanaan pembangunan di perangkat daerah yang ada agar dapat menyampaikan laporan tepat waktu.
  - c. Menyesuaikan sistem kerja dengan memadfaatkan teknologi informasi guan mengatasi kondisi pandemi yang belum selesai.



### **BAB III**

## **CAPAIAN KINERJA PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dijelaskan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Dapat disampaikan bahwa untuk tahun anggaran 2021, Biro Administrasi Pembangunan tidak menerima/memberikan Tugas Pembantuan sebagaimana yang dimaksud di atas.



## **BAB IV**

### **PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan program/kegiatannya hanya bersifat memfasilitasi/ mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan oleh dinas-dinas teknis terkait khususnya dalam program/kegiatan yang berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang dalam implementasinya diterjemahkan ke dalam beberapa program/kegiatan sebagaimana termuat dalam RENSTRA dan RENJA Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat bahwa Biro Administrasi Pembangunan merupakan unit kerja di bawah naungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang secara khusus pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya hanya bersifat mendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan terkait Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dilakukan oleh dinas-dinas teknis yang secara langsung melaksanakan urusan desentralisasi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatannya Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Akhir Tahun 2021 Biro Administrasi Pembangunan merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah mengenai urusan Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan selama tahun 2021.

Sebagai unit kerja baru dibawah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan unit kerja administratif, Biro Administrasi Pembangunan tidak secara langsung mengemban atau menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib/Pilihan tertentu. Biro Administrasi Pembangunan dalam pelaksanaan tugasnya bertindak sebagai unit kerja yang bertugas merumuskan, memfasilitasi, mengkoordinasikan dan memonitoring kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan yang bersinggungan dengan Penyelenggaraan Seluruh Urusan Pemerintahan Wajib/Pilihan.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, selanjutnya atas nama Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan LPPD ini, Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat kepada kita semua.